



**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SEKTOR KONTRUKSI
SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH
JABATAN KERJA AHLI MUDA
PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA**

**ETOS KERJA, ETIKA PROFESI DAN
MANAJEMEN ORGANISASI KERJA PERENCANA
TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA**

**KODE UNIT KOMPETENSI:
F45.PW01.002.01**

BUKU PENILAIAN



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI**
Jalan Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat – Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan dengan bidang kerjanya. Berbagai upaya ditempuh, baik melalui pendidikan formal, pelatihan secara berjenjang sampai pada tingkat pemagangan di lokasi proyek atau kombinasi antara pelatihan dan pemagangan, sehingga tenaga kerja mampu mewujudkan standar kinerja yang dipersyaratkan di tempat kerja.

Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu institusi pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pembinaan kompetensi, secara bertahap menyusun standar-standar kompetensi kerja yang diperlukan oleh masyarakat jasa konstruksi. Kegiatan penyediaan kompetensi kerja tersebut dimulai dengan analisa kompetensi dalam rangka menyusun suatu standar kompetensi kerja yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi tenaga kerja di bidang jasa konstruksi yang bertugas sesuai jabatan kerjanya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya.

Penyusunan Modul Pelatihan (Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi) untuk jabatan kerja **Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota** mengacu kepada SKKNI Ahli Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota, yang dalam penjabarannya kepada program pelatihan tertuang pada Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK). Penyusunan KPBK dilakukan dengan mengidentifikasi Unit-unit Kompetensi melalui analisis terhadap Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang merupakan dasar rumusan penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan.

Modul ini merupakan salah satu sarana dasar yang digunakan dalam pelatihan sebagai upaya memenuhi kompetensi standar seorang pemangku jabatan kerja seperti tersebut diatas, sehingga dimungkinkan adanya tambahan materi-materi lainnya untuk lebih meningkatkan kompetensi dari standar yang dipersyaratkan setiap jabatan kerja

Penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan diantaranya Focus Group Discussion serta Workshop yang melibatkan para nara sumber, praktisi, pemangku jabatan serta stakeholder. Dengan keterbatasan pelibatan stakeholder terkait dalam proses penyusunan modul ini, dan seiring dengan perkembangan dan dinamika teknologi konstruksi kedepan, maka tetap diupayakan penyesuaian dan perbaikan secara berkelanjutan sejalan dengan dilaksanakannya pelatihan dengan menggunakan modul ini dilapangan melalui respon peserta pelatihan, instruktur, asesor serta semua pihak.

Pada kesempatan ini disampaikan banyak terimakasih kepada tim penyusun yang telah mencurahkan segala kemampuannya sehingga dapat menyelesaikan modul ini, serta semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan modul pelatihan ini.

Jakarta, Nopember 2012

PUSAT PEMBINAAN
KOMPETENSI DAN PELATIHAN
KONSTRUKSI

DAFTAR ISI

Kata Pengantari
DAFTAR ISI1
BAB I KONSEP PENILAIAN2
1.1 Latar Belakang.....	.2
1.2 Tujuan.....	.2
1.3 Metoda Penilaian2
BAB II PELAKSANAAN PENILAIAN4
3.1 Kunci Jawaban Tugas-Tugas (Teori)4
3.2 Daftar Cek Unjuk Kerja (Praktek).....	.9

Lampiran 1 Jawaban Tugas Tertulis I
Lampiran 2 Jawaban Tugas Tertulis II
Lampiran 3 Jawaban Tugas Tertulis III

BAB I

KONSEP PENILAIAN

1.1 Latar Belakang

Buku penilaian untuk unit kompetensi Menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan berbasis kompetensi yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melalui buku informasi dan buku kerja. Setelah latihan-latihan (*exercise*) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per unit kompetensi dan materi uji komprehensif itu ada dalam buku penilaian ini.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji kompetensi peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku informasi dan buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten terhadap unit kompetensi Menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

1.3 Metoda Penilaian

1. Metoda Penilaian Pengetahuan

a. Tes Tertulis

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat, menjodohkan, benar-salah, dan pilihan ganda. Tes essay bisa diberikan selama tes essay tersebut tes essay tertutup dalam bentuk Jawaban Singkat, tidak essay terbuka, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi faktor subyektif penilai.

b. Tes Wawancara

Tes wawancara dilakukan untuk menggali atau memastikan hasil tes tertulis sejauh itu diperlukan. Tes wawancara ini dilakukan secara perseorangan antara penilai dengan peserta uji/peserta pelatihan. Penilai sebaiknya lebih dari satu orang.

2. Metoda Penilaian Keterampilan

a. Tes Simulasi

Tes simulasi ini digunakan untuk menilai keterampilan dengan menggunakan media bukan yang sebenarnya, misalnya menggunakan tempat kerja tiruan (bukan tempat kerja yang sebenarnya), obyek pekerjaan disediakan atau hasil rekayasa sendiri, bukan obyek kerja yang sebenarnya.

b. Aktivitas Praktik

Penilaian dilakukan secara sebenarnya, di tempat kerja sebenarnya dengan menggunakan obyek kerja sebenarnya. Namun dalam pelaksanaan pelatihan untuk unit kompetensi ini, metoda penilaian ini tidak digunakan.

3. Metoda Penilaian Sikap Kerja

a. Observasi

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

BAB II

PELAKSANAAN PENILAIAN

2.1 Kunci Jawaban Tugas-Tugas (Teori)

Tugas Teori I : Melaksanakan Etika Profesi secara baik dalam Bekerja sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja

Pelatihan : Etos Kerja, Etika Profesi dan Manajemen Organisasi Kerja Perencana Tata Ruang Wilayah Dan Kota

Waktu : 30 menit

Petunjuk Umum

1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

a. Jawaban Singkat

1. Apa yang saudara ketahui tentang definisi etika?

.....
.....
.....
.....
.....

2. Apa saja perinsip-prinsip etika ahli perencana?

.....
.....
.....
.....
.....

3. Jelaskan keahlian perencana yang dituang dalam KAK!

.....
.....
.....
.....

2.1.1 Lembar Kunci Jawaban Teori I

NO. SOAL	KUNCI JAWABAN	JAWABAN PESERTA			KETERANGAN
			K	BK	
1	Lampiran I				
2	Lampiran I				
3	Lampiran I				

Catatan Penilai :

Tugas Teori II : Melaksanakan Etika Profesi secara baik dalam Berhubungan dengan Pengguna Jasa

Pelatihan : Etos Kerja, Etika Profesi dan Manajemen Organisasi Kerja Perencana Tata Ruang Wilayah Dan Kota

Waktu : 30 menit

Petunjuk Umum

- Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
- Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
- Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

a. Jawaban Singkat

- Sebutkan hak dan kewajiban pelaksana ahli perencana kepada pengguna jasa!
.....
.....
.....
.....
.....
- Apa yang harus diperhatikan oleh ahli perencana dalam melaksanakan pekerjaan?
.....
.....
.....
.....
.....
- Sebutkan etika dalam membina komunikasi antara perencana dengan pengguna jasa!
.....
.....
.....
.....

2.1.2 Lembar Kunci Jawaban Teori II

NO. SOAL	KUNCI JAWABAN	JAWABAN PESERTA			KETERANGAN
			K	BK	
1	Lampiran II				
2	Lampiran II				
3	Lampiran II				

Catatan Penilai :

Tugas Teori III : Melaksanakan Etika Profesi secara baik dalam Berhubungan dengan Lingkungan

Pelatihan : Etos Kerja, Etika Profesi dan Manajemen Organisasi Kerja Perencana Tata Ruang Wilayah Dan Kota

Waktu : 30 menit

Petunjuk Umum

1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

a. Jawaban Singkat

1. Sebutkan upaya pemerintah terhadap masyarakat mengenai etika lingkungan!

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Sebutkan NSPK yang menyebutkan keterkaitan pengendalian lingkungan dengan mitigasi bencana!

.....
.....
.....
.....
.....

3. Jelaskan konsep pembangunan berkelanjutan!

.....
.....
.....
.....
.....

2.1.3 Lembar Kunci Jawaban Tertulis III

NO. SOAL	KUNCI JAWABAN	JAWABAN PESERTA			KETERANGAN
			K	BK	
1	Lampiran III				
2	Lampiran III				
3	Lampiran III				

Catatan Penilai :

2.2 Daftar Cek Unjuk Kerja

Tugas Unjuk Kerja 1 : Melaksanakan Etika Profesi secara baik dalam Bekerja sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja

Instruksi kerja

- a. Uraikan etika profesi perencana secara baik.
- b. Uraikan lingkup tugas diidentifikasi dengan baik dan layanan keahlian sesuai dengan KAK.
- c. Uraikan tanggapan profesional terhadap KAK dengan jelas

Tugas Unjuk Kerja 2 : Melaksanakan Etika Profesi secara baik dalam Berhubungan dengan Pengguna Jasa

Instruksi kerja

- a. Identifikas dan menguraikan hak dan kewajiban antara pelaksana pekerjaan dan pengguna jasa dengan baik.
- b. Uraikan hak dan kewajiban sebagai pelaksana pekerjaan dengan baik.
- c. Laksanakan komunikasi dan hubungan baik dengan pengguna jasa dengan baik

Tugas Unjuk Kerja 3 : Melaksanakan Etika Profesi secara baik dalam Berhubungan dengan Lingkungan

Instruksi kerja

- a. Identifikasi dan menguraikan perundangan tentang pengendalian lingkungan dengan baik.
- b. Uraikan peraturan pengendalian lingkungan untuk mitigasi bencana secara cermat.
- c. Uraikan kelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan

a. Daftar Cek Unjuk Kerja

NO.	DAFTAR TUGAS/ INSTRUKSI	POIN YANG DICEK	PENCAPAIAN		PENILAIAN	
			YA	TIDAK	K	BK
1.	Uraikan etika profesi perencana	Etika profesi perencana				
2.	Uraikan lingkup tugas sesuai KAK	Uraian lingkup tugas sesuai KAK				

NO.	DAFTAR TUGAS/ INSTRUKSI	POIN YANG DICEK	PENCAPAIAN		PENILAIAN	
			YA	TIDAK	K	BK
	secara cermat	secara cermat				
3.	Tanggapi KAK	Tanggapan tentang KAK				
4.	Rinci hal-hal kritis yang sering terjadi dalam hubungan antara pelaksana pekerjaan dan pengguna jasa	Hal-hal kritis yang sering terjadi dalam hubungan antara pelaksana pekerjaan dan pengguna jasa				
5.	Tunjukkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh pelaksana pekerjaan	Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pelaksana pekerjaan				
6.	Berikan contoh hal-hal yang tidak etis dalam membina hubungan dengan pengguna jasa	Contoh hal-hal yang tidak etis dalam membina hubungan dengan pengguna jasa				
7.	Berikan contoh bagaimana melaksanakan etika profesi yang berhubungan dengan lingkungan	Contoh bagaimana melaksanakan etika profesi yang berhubungan dengan lingkungan				
8.	Tunjukkan peraturan terkait peraturan pengendalian lingkungan	Peraturan terkait peraturan pengendalian lingkungan				
9	Tunjukkan contoh penerapan konsep pembangunan berkelanjutan	Contoh penerapan konsep pembangunan berkelanjutan				

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA

TIDAK

	NAMA	TANDA TANGAN
PESERTA
PENILAI

Catatan Penilai :

a. Penilaian Sikap Kerja

CEK LIST PENILAIAN SIKAP KERJA				
Melaksanakan Etika Profesi secara baik dalam Bekerja sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja				
Indikator Unjuk Kerja	No. KUK	K	BK	Keterangan
Harus mampu menunjukkan hal-hal penting terkait dengan etika profesi perencana dengan cermat	2.1			
Harus mampu menguraikan layanan keahlian sesuai KAK secara cermat	2.2			
Harus mampu menguraikan KAK dengan uraian profesional yang jelas dan cermat	2.3			

CEK LIST PENILAIAN SIKAP KERJA				
Melaksanakan Etika Profesi secara baik dalam Berhubungan dengan Pengguna Jasa				
Indikator Unjuk Kerja	No. KUK	K	BK	Keterangan
Harus mampu menguraikan hak dan kewajiban pelaksana pekerjaan	2.2			
Harus mampu dalam membina hubungan dengan pengguna jasa secara profesional	2.3			

CEK LIST PENILAIAN SIKAP KERJA				
Melaksanakan Etika Profesi secara baik dalam Berhubungan dengan Lingkungan				
Indikator Unjuk Kerja	No. KUK	K	BK	Keterangan
Harus mampu melaksanakan etika profesi yang berhubungan dengan lingkungan	2.1			

Lampiran 1

Jawaban Tugas Teori I

1. Definisi etika menurut saya adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika profesi perencana merupakan ilmu pengetahuan yang harus dipegang teguh oleh profesi perencana dalam menyediakan jasanya kepada masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan profesional
2. Prinsip-prinsip etika ahli perencana, khususnya berdasarkan *American Planning Association's professional institut (AICP)/ American Planning Association (APA)* meliputi:
 - Melayanani kepentingan umum/publik;
 - Mendukung peranserta warga masyarakat dalam perencanaan;
 - Menyadari bahwa keputusan perencanaan berciri komprehensif dan jangka panjang;
 - Memperluas pilihan dan kesempatan bagi semua warga;
 - Memfasilitasi koordinasi melalui proses perencanaan;
 - Menghindar dari benturan kepentingan;
 - Memberikan jasa perencanaan secara cermat dan teliti;
 - Tidak meminta atau menawarkan 'jasa'
 - Tidak membuka atau menggunakan secara tidak pantas informasi rahasia demi keuntungan finansial;
 - Menjamin akses yang sama untuk publik ke laporan dan studi-studi perencanaan;
 - Menjamin pemaparan sepenuhnya pada waktu konsultasi publik;

- Menjaga kepercayaan publik; dan
 - Menghormati *professional codes of ethics and conduct*.
3. Keahlian perencana yang dituang dalam kak
- Bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pelaksanaan pekerjaan, baik teknis maupun non teknis
 - Menterjemahkan keinginan dari pemberi tugas untuk pelaksanaan pekerjaan ini, sesuai dengan apa yang telah digariskan dan dituangkan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Mengkoordinir dan mengalokasikan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing tenaga ahli.
 - Mempertanggungjawabkan secara keseluruhan penyelenggaraan pelaksanaan pekerjaan ini dan menjaga mutu pekerjaan sesuai dengan maksud dan tujuan, serta sasaran pekerjaan dari awal sampai akhir pelaksanaan
 - Menyusun rencana kegiatan dengan semua tenaga ahli, serta mengarahkan pelaksanaan pekerjaan
 - Menyusun metodologi yang tepat dan sesuai dengan keluaran studi serta disetujui oleh pihak pemberi kerja
 - Mengkaji dokumen rencana (sebagai contoh: Rencana Tata Ruang Wilayah/ RTRW dan Rencana Detil Tata Ruang/ RDTR)

Lampiran 2

Jawaban tugas teori ii

1. Hak dan kewajiban pelaksana ahli perencana kepada pengguna jasa yaitu saling bersinergi satu sama lain menjadi partner bersama, ahli perencana memberikan edukasi terkait perencanaan dan masukan sedangkan pengguna jasa memberikan informasi terkini mengenai isu perencanaan yang ada dan apa tujuan yang di capai. Hendaknya ahli perencana mengakomodir keinginan pengguna jasa apabila bernilai positif untuk perencanaan wilayah dan kota.

2. Yang harus diperhatikan oleh ahli perencana dalam melaksanakan pekerjaan adalah terjaut dengan pelaporan dan output pekerjaan/ produk pekerjaan sesuai dengan KAK dan memberikan nilai lebih pada inovasi yang diberikan.
3. Etika dalam membina komunikasi antara perencana dengan pengguna jasa yaitu adanya integritas yaitu bekerja dengan standar etika tertinggi, jujur terhadap diri sendiri dan orang lain dalam segala urusan, menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas, menaati aturan dan bertanggung jawab. Adanya mutual trust/ saling percaya yaitu memegang teguh etika bersama seluruh komponen internal dan mitra, konsisten memnuhi standar layanan yang dijanjikan, mempercayai dan menghormati satu sama lain dengan itikad baik untuk mendapatkan kepercayaan.

Lampiran 3

Jawaban Tugas Teori III

1. Upaya pemerintah terhadap masyarakat mengenai etika lingkungan yaitu memberikan prinsip kepada masyarakat dan menegakkan etika terhadap lingkungannya yang diantaranya :
 - Prinsip kehormatan (Sikap menghormati dan menghargai lingkungan sekitar)
 - Prinsip tanggung jawab (Sikap usaha dan tindakan terhadap lingkungan sekitar)
 - Prinsip demokrasi (Sikap kebersamaan dan kerjasama terhadap lingkungan sekitar)
 - Prinsip keadilan (Sikap adil, nilai, dan norma terhadap lingkungan sekitar)
2. NSPK yang menyebutkan keterkaitan pengendalian lingkungan dengan mitigasi bencana yaitu Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, seluruh daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Risiko Bencana (RAD-PRB) yang sensitif terhadap kondisi kebencanaan di daerah masing-masing. RAD-PRB tersebut sekaligus merupakan dokumen perencanaan yang komplemen terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adanya peraturan daerah yang mengacu pada peraturan dan perundangan yang terkait dengan penanggulangan bencana termasuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana, antara lain:

- Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu didukung oleh peraturan mengenai penyediaan peta rawan bencana yang mudah diperoleh dan diakses oleh masyarakat dan sangat dibutuhkan sebagai bagian dari upaya penyebaran informasi kepada masyarakat
- Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil perlu memperhatikan kerawanan wilayah pesisir terhadap bencana, termasuk peraturan mengenai sempadan pantai;
- Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pengelolaan hutan lestari perlu kembali digalakkan tidak hanya untuk menjaga kestabilan ekosistem melainkan juga sebagai salah satu upaya mitigasi bencana

3. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Konsep ini mengandung dua unsur :

- Kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua negara.
- Keterbatasan. Penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa depan.